

**RELIGIUSITAS MASYARAKAT ADAT HINDU DI KABUPATEN
BULELENG: STUDI ETNOGRAFI KEHIDUPAN SOSIAL KEAGAMAAN**

Oleh

Ida Bagus Gede Subawa

Institut Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja

gdesubawa@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the religiosity of indigenous Hindu communities in Buleleng Regency through an ethnographic approach to their socio-religious life. Religiosity is understood not only as the expression of beliefs and rituals but also as a value system that shapes social behavior, cultural identity, and harmonious relationships among humans, God, and nature. The research employed a qualitative ethnographic design, involving purposively selected informants, including bendesa adat, pemangku, sulinggih, customary leaders, and community members actively engaged in socio-religious activities. Data were collected through participant observation, in-depth interviews, and document analysis, and analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña.

The findings indicate that the religiosity of indigenous Hindu communities is socially constructed through the integration of Hindu teachings, customary institutions, and local cultural traditions. Values such as Dharma, Tri Hita Karana, Tat Twam Asi, Tri Kaya Parisudha, and Pañca Yajña are internalized through family, desa adat, banjar adat, and socio-religious practices, including ngayah, customary assemblies, religious ceremonies, and environmental conservation. Customary institutions play a crucial role in sustaining religiosity through educational, normative, and integrative functions. Despite the challenges of globalization and digitalization, these communities maintain their religious values while adapting to social change. The study contributes to the fields of anthropology and sociology of religion and indigenous Hindu studies in Indonesia.

Keywords: Indigenous Hindu Communities; Religiosity; Ethnography; Customary Institutions; Buleleng Regency; Hindu Values.

I. PENDAHULUAN

Religiusitas merupakan salah satu dimensi mendasar dalam kehidupan manusia yang membentuk cara individu memahami eksistensi dirinya, membangun hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam semesta. Dalam perspektif sosiologi agama, religiusitas tidak hanya dipahami sebagai keyakinan terhadap sesuatu

yang sakral, melainkan juga sebagai sistem makna yang memengaruhi tindakan sosial, pembentukan identitas, serta pola interaksi dalam kehidupan bermasyarakat (Durkheim, 1995; Berger, 1967). Bagi masyarakat tradisional, agama bukan sekadar institusi normatif, tetapi menjadi landasan yang mengatur keseluruhan

aspek kehidupan, mulai dari sistem nilai, organisasi sosial, tata ruang, hingga praktik budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Geertz (1973) menjelaskan bahwa agama merupakan suatu sistem simbol yang berfungsi membangun suasana hati dan motivasi yang kuat, menyeluruh, dan bertahan lama melalui konsepsi tentang tatanan kehidupan yang dianggap benar. Dengan demikian, religiusitas tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan budaya tempat masyarakat hidup, karena praktik keberagamaan selalu dipengaruhi oleh pengalaman kolektif, tradisi lokal, dan dinamika perubahan zaman.

Dalam konteks masyarakat adat, religiusitas memiliki karakter yang lebih kompleks karena terintegrasi dengan sistem adat, hukum tidak tertulis, serta berbagai tradisi yang membentuk identitas komunal. Masyarakat adat memandang agama bukan hanya sebagai hubungan spiritual antara manusia dengan Tuhan, melainkan sebagai pedoman hidup yang mengatur relasi harmonis antara manusia, alam, leluhur, dan komunitasnya. Perspektif tersebut sejalan dengan konsep *lived religion*, yaitu pemahaman bahwa agama sesungguhnya hidup melalui pengalaman, praktik, dan interaksi sosial masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya melalui doktrin formal (McGuire, 2008). Oleh karena itu, kajian mengenai religiusitas masyarakat adat menjadi penting untuk memahami bagaimana nilai-nilai

keagamaan diwujudkan dalam tindakan sosial, solidaritas komunitas, serta mekanisme pelestarian budaya di tengah perubahan masyarakat modern.

Pulau Bali merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memperlihatkan hubungan erat antara agama, adat, dan budaya. Kehidupan masyarakat Hindu Bali dibangun di atas sistem nilai yang mengintegrasikan ajaran agama dengan tradisi lokal sehingga menghasilkan karakter sosial-keagamaan yang khas. Desa adat, banjar, pura, sistem gotong royong (*ngayah*), pelaksanaan *pañca yadnya*, serta berbagai ritual keagamaan menjadi manifestasi religiusitas yang hidup dalam keseharian masyarakat. Pitana (1994) menjelaskan bahwa agama Hindu di Bali berkembang melalui proses dialog yang panjang dengan budaya lokal sehingga melahirkan praktik keagamaan yang bersifat kontekstual tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar ajaran Hindu. Dalam perspektif antropologi, kondisi tersebut menunjukkan bahwa agama tidak berkembang secara terpisah dari kebudayaan, tetapi tumbuh melalui proses adaptasi dan internalisasi nilai yang berlangsung secara historis (Koentjaraningrat, 2009). Oleh sebab itu, memahami religiusitas masyarakat Hindu Bali memerlukan pendekatan yang tidak hanya menelaah teks-teks keagamaan, tetapi juga mengkaji praktik sosial dan pengalaman hidup masyarakat sebagai pelaku budaya.

Salah satu wilayah di Bali yang memiliki kekayaan tradisi masyarakat adat adalah Kabupaten Buleleng. Kabupaten ini dikenal memiliki karakter sosial dan budaya yang beragam karena dipengaruhi oleh kondisi geografis, sejarah migrasi, serta interaksi berbagai kelompok masyarakat sejak masa kerajaan hingga era modern. Keberagaman desa adat di Kabupaten Buleleng memperlihatkan variasi praktik keagamaan, struktur kelembagaan adat, sistem kepemimpinan tradisional, hingga bentuk-bentuk ritual yang berkembang sesuai karakter lokal masing-masing wilayah. Di tengah keragaman tersebut, masyarakat adat Hindu di Kabupaten Buleleng tetap mempertahankan nilai-nilai religius sebagai fondasi kehidupan sosial.

Pelaksanaan upacara keagamaan, tradisi ngayah, musyawarah adat, penghormatan terhadap leluhur, serta pengelolaan pura menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat yang memperlihatkan keterkaitan erat antara agama, budaya, dan solidaritas sosial. Nilai-nilai tersebut tidak hanya berfungsi sebagai ekspresi spiritual, tetapi juga sebagai mekanisme sosial dalam menjaga kohesi komunitas dan keberlanjutan identitas budaya.

Meskipun demikian, kehidupan religius masyarakat adat Hindu di Kabupaten Buleleng tidak terlepas dari berbagai dinamika sosial yang berkembang pada era globalisasi.

Perubahan struktur ekonomi, meningkatnya mobilitas penduduk, perkembangan teknologi informasi, pertumbuhan sektor pariwisata, serta masuknya budaya global telah memengaruhi pola kehidupan masyarakat, termasuk praktik-praktik keagamaan. Generasi muda menghadapi tantangan dalam mempertahankan tradisi di tengah meningkatnya orientasi terhadap pendidikan, pekerjaan, dan gaya hidup modern.

Pada saat yang sama, desa adat juga dituntut untuk mampu beradaptasi terhadap perubahan sosial tanpa kehilangan identitas religius dan budaya yang menjadi ciri khasnya. Berger (1967) menyatakan bahwa modernisasi sering kali membawa proses diferensiasi sosial yang dapat mengubah cara masyarakat memaknai agama dalam kehidupan sehari-hari. Namun demikian, berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa perubahan tersebut tidak selalu mengarah pada melemahnya religiusitas, melainkan dapat menghasilkan bentuk-bentuk baru ekspresi keagamaan yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman (Casanova, 1994). Dengan demikian, penting untuk memahami bagaimana masyarakat adat Hindu di Kabupaten Buleleng mengonstruksi, mempertahankan, dan mentransformasikan religiusitasnya dalam menghadapi dinamika sosial kontemporer.

Berbagai penelitian mengenai masyarakat Hindu Bali selama ini umumnya berfokus pada aspek ritual keagamaan, desa adat, hukum adat, pariwisata budaya, maupun implementasi konsep Tri Hita Karana dalam pembangunan sosial. Kajian-kajian tersebut memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan hubungan antara agama dan budaya di Bali, namun sebagian besar masih menempatkan religiusitas sebagai latar belakang dari praktik-praktik sosial yang diamati. Penelitian yang secara khusus mengeksplorasi religiusitas sebagai pengalaman hidup masyarakat (*lived religiosity*), terutama melalui pendekatan etnografi, masih relatif terbatas. Padahal, pendekatan etnografi memungkinkan peneliti memahami makna subjektif yang diberikan masyarakat terhadap praktik keagamaan, simbol-simbol religius, serta nilai-nilai yang mengarahkan tindakan sosial mereka (Geertz, 1973; Spradley, 1980).

Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak dilakukan di wilayah Bali Selatan yang menjadi pusat perkembangan pariwisata dan budaya, sementara masyarakat adat di Kabupaten Buleleng masih relatif kurang mendapatkan perhatian sebagai lokasi penelitian yang memiliki karakter sosial-keagamaan yang khas. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mampu menggambarkan secara mendalam bagaimana religiusitas masyarakat adat Hindu di Kabupaten Buleleng

diwujudkan dalam kehidupan sosial-keagamaan sehari-hari, sekaligus menjelaskan makna yang terkandung di balik praktik-praktik tersebut sebagai bagian dari identitas budaya dan keberlangsungan masyarakat adat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis religiusitas masyarakat adat Hindu di Kabupaten Buleleng melalui pendekatan etnografi. Secara khusus, penelitian ini diarahkan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk religiusitas yang hidup dalam masyarakat adat, menjelaskan makna yang terkandung dalam praktik sosial-keagamaan berdasarkan perspektif masyarakat sebagai pelaku budaya (*emic perspective*), serta menganalisis hubungan antara religiusitas, adat, budaya, dan solidaritas sosial dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan etnografi dipilih karena memberikan ruang bagi peneliti untuk memahami realitas sosial secara mendalam melalui keterlibatan langsung dengan masyarakat, sehingga mampu menangkap pengalaman, nilai, simbol, serta praktik keagamaan sebagaimana dipahami oleh masyarakat itu sendiri (Spradley, 1980; Hammersley & Atkinson, 2019).

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berupaya mendeskripsikan aktivitas keagamaan yang tampak di permukaan, tetapi juga mengungkap makna filosofis dan sosial yang membentuk kehidupan religius

masyarakat adat Hindu di Kabupaten Buleleng.

Secara akademik, kajian mengenai religiusitas masyarakat adat telah berkembang dalam berbagai perspektif keilmuan, mulai dari antropologi agama, sosiologi agama, hingga kajian budaya. Geertz (1973) memandang agama sebagai sistem simbol yang memberikan kerangka makna bagi kehidupan manusia, sedangkan Durkheim (1995) menekankan fungsi agama sebagai perekat solidaritas sosial melalui pembentukan kesadaran kolektif (*collective conscience*). Berger (1967) menjelaskan bahwa agama berfungsi membangun realitas sosial melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi sehingga nilai-nilai keagamaan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Dalam konteks masyarakat adat, Asad (1993) mengingatkan bahwa agama tidak dapat dipahami hanya sebagai sistem kepercayaan yang bersifat universal, tetapi harus ditempatkan dalam konteks sejarah, relasi kekuasaan, dan praktik budaya masyarakat yang melahirkannya.

Oleh karena itu, religiusitas masyarakat adat Hindu perlu dipahami sebagai fenomena sosial yang dinamis, yang terus mengalami negosiasi dan penyesuaian terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan akar budaya dan spiritualitasnya. Di Indonesia, penelitian mengenai masyarakat adat Hindu umumnya berfokus pada

kelembagaan desa adat, pelaksanaan upacara keagamaan, hukum adat, pelestarian budaya, maupun implementasi konsep Tri Hita Karana dalam pembangunan. Pitana (1994) menegaskan bahwa kehidupan masyarakat Hindu Bali dibangun melalui integrasi yang harmonis antara agama, adat, dan budaya sehingga ketiganya sulit dipisahkan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Kajian lain juga menunjukkan bahwa desa adat memiliki peran penting dalam menjaga identitas budaya, memperkuat kohesi sosial, serta mempertahankan keberlangsungan nilai-nilai Hindu Bali di tengah arus globalisasi (Warren, 1993; Lansing, 2006). Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut lebih menekankan aspek kelembagaan, ritual, atau kebijakan budaya, sedangkan dimensi religiusitas sebagai pengalaman hidup masyarakat belum menjadi fokus utama. Padahal, pemahaman mengenai bagaimana masyarakat memaknai dan menghidupi agama dalam kehidupan sehari-hari merupakan bagian penting dalam menjelaskan keberlangsungan sistem sosial dan budaya masyarakat adat.

Berdasarkan telaah terhadap berbagai penelitian terdahulu, terdapat beberapa kesenjangan penelitian (*research gap*) yang menjadi dasar penting dilaksanakannya penelitian ini. Pertama, penelitian mengenai masyarakat adat Hindu di Bali masih didominasi oleh kajian normatif mengenai ritual, adat, atau hukum adat, sementara kajian yang secara khusus

mengungkap religiusitas sebagai pengalaman sosial-keagamaan masyarakat masih relatif terbatas. Kedua, sebagian besar penelitian menggunakan pendekatan sosiologis atau kajian kebijakan, sehingga belum banyak memanfaatkan pendekatan etnografi untuk memahami makna religiusitas berdasarkan perspektif masyarakat sebagai pelaku budaya. Ketiga, penelitian mengenai masyarakat adat Hindu di Kabupaten Buleleng masih jauh lebih sedikit dibandingkan penelitian yang dilakukan di wilayah Bali Selatan, padahal Kabupaten Buleleng memiliki karakter sosial, sejarah, dan budaya yang berbeda sehingga berpotensi menghadirkan perspektif baru dalam studi masyarakat adat Hindu. Keempat, belum banyak penelitian yang menghubungkan religiusitas dengan pembentukan identitas budaya, solidaritas sosial, dan kemampuan masyarakat adat dalam beradaptasi terhadap perubahan sosial kontemporer.

Kesenjangan-kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa kajian mengenai religiusitas masyarakat adat Hindu di Kabupaten Buleleng masih memiliki ruang yang luas untuk dikembangkan. Atas dasar research gap tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan (novelty) pada beberapa aspek. Pertama, penelitian ini menempatkan religiusitas sebagai fenomena sosial yang hidup (lived religiosity), bukan sekadar sebagai sistem keyakinan atau pelaksanaan

ritual keagamaan. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana nilai-nilai agama diwujudkan dalam tindakan sosial, hubungan antarmasyarakat, serta mekanisme pelestarian budaya. Kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi untuk menggali pengalaman religius masyarakat berdasarkan perspektif emic, sehingga makna simbolik, nilai budaya, dan praktik keagamaan dipahami dari sudut pandang masyarakat itu sendiri. Ketiga, penelitian ini mengintegrasikan perspektif antropologi agama, sosiologi agama, dan filsafat Hindu dalam menganalisis religiusitas masyarakat adat, sehingga menghasilkan analisis yang lebih holistik dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung menggunakan satu pendekatan disiplin ilmu. Keempat, penelitian ini menghasilkan deskripsi empiris mengenai karakter religiusitas masyarakat adat Hindu di Kabupaten Buleleng yang selama ini masih relatif jarang dikaji dalam literatur akademik.

Selain menawarkan kebaruan, penelitian ini juga memiliki justifikasi ilmiah yang kuat. Secara teoretis, hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya khazanah kajian antropologi agama, sosiologi agama, dan studi Hindu dengan menghadirkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara religiusitas, adat, dan kehidupan sosial masyarakat. Penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan

konsep lived religion dalam konteks masyarakat adat Hindu Indonesia yang selama ini masih didominasi oleh kajian masyarakat Barat. Dari sisi metodologis, penggunaan etnografi memberikan kontribusi dalam memperlihatkan bagaimana pendekatan kualitatif mampu mengungkap makna yang tersembunyi di balik praktik sosial-keagamaan masyarakat. Sementara itu, secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah, desa adat, Parisada Hindu Dharma Indonesia, serta lembaga pendidikan dalam merumuskan kebijakan pelestarian budaya dan penguatan nilai-nilai religius masyarakat adat di tengah perubahan sosial yang semakin kompleks.

Pada akhirnya, penelitian mengenai religiusitas masyarakat adat Hindu di Kabupaten Buleleng tidak hanya penting sebagai upaya mendokumentasikan praktik kehidupan sosial-keagamaan masyarakat, tetapi juga sebagai ikhtiar akademik untuk memahami bagaimana agama terus hidup, berkembang, dan bertransformasi dalam dinamika masyarakat kontemporer. Religiusitas yang diwujudkan melalui ritual, tradisi, nilai gotong royong, penghormatan terhadap leluhur, dan ketaatan terhadap adat merupakan modal sosial yang berperan penting dalam menjaga harmoni kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, melalui pendekatan etnografi, penelitian ini diharapkan mampu menghadirkan pemahaman

yang komprehensif mengenai konstruksi religiusitas masyarakat adat Hindu di Kabupaten Buleleng sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan, pelestarian budaya, dan penguatan identitas masyarakat adat Hindu di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain etnografi untuk mengkaji religiusitas masyarakat adat Hindu di Kabupaten Buleleng. Pendekatan etnografi dipilih karena memungkinkan peneliti memahami makna, nilai, dan praktik religius masyarakat berdasarkan perspektif pelaku (*emic perspective*), sehingga dapat menggambarkan kehidupan sosial-keagamaan secara mendalam dalam konteks budaya yang melingkupinya (Spradley, 1980; Hammersley & Atkinson, 2019). Lokasi penelitian ditetapkan pada beberapa desa adat di Kabupaten Buleleng yang masih mempertahankan tradisi dan praktik keagamaan Hindu secara kuat. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, meliputi *bendesa adat*, pemangku, sulinggih, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta anggota masyarakat yang terlibat aktif dalam kegiatan sosial-keagamaan.

Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi terhadap berbagai dokumen adat, *awig-awig*, arsip, serta literatur yang relevan. Triangulasi sumber, teknik, dan waktu diterapkan untuk

meningkatkan kredibilitas dan keabsahan data penelitian (Creswell & Poth, 2018).

Analisis data dilakukan secara interaktif mengikuti model Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi proses kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Seluruh data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi ditranskripsi, dikodekan, kemudian dikelompokkan ke dalam tema-tema yang berkaitan dengan bentuk religiusitas, praktik sosial-keagamaan, makna simbolik, serta dinamika kehidupan masyarakat adat Hindu di Kabupaten Buleleng. Interpretasi data dilakukan secara induktif dengan memadukan perspektif antropologi agama, sosiologi agama, dan konsep *lived religion* untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konstruksi religiusitas masyarakat adat. Selama proses penelitian, peneliti juga menerapkan prinsip etika penelitian dengan memperoleh persetujuan dari informan (*informed consent*), menjaga kerahasiaan identitas responden, serta menghormati norma, adat istiadat, dan nilai-nilai budaya masyarakat setempat (Lincoln & Guba, 1985).

III. PEMBAHASAN

3.1 Konstruksi Religiusitas Masyarakat Adat Hindu di Kabupaten Buleleng

Religiusitas masyarakat adat Hindu di Kabupaten Buleleng merupakan konstruksi sosial yang terbentuk melalui interaksi antara ajaran agama Hindu, sistem adat, serta pengalaman historis masyarakat dalam

menjalani kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, religiusitas tidak dipahami hanya sebagai pelaksanaan ritual keagamaan, tetapi sebagai cara hidup yang menjiwai seluruh aktivitas individu maupun komunitas. Bagi masyarakat adat, kehidupan yang religius diwujudkan melalui kesadaran untuk melaksanakan *dharma*, menjaga keseimbangan hubungan dengan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, sesama manusia, dan alam semesta. Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa agama tidak diposisikan sebagai aspek yang terpisah dari kehidupan sosial, melainkan menjadi landasan utama dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Temuan ini memperkuat pandangan Geertz (1973) bahwa agama merupakan sistem simbol yang membentuk cara manusia memaknai realitas sekaligus mengarahkan tindakan sosialnya.

Dalam kehidupan masyarakat adat Hindu di Kabupaten Buleleng, religiusitas dibangun melalui proses sosialisasi yang berlangsung sejak usia dini di lingkungan keluarga, banjar adat, dan desa adat. Orang tua mengenalkan nilai-nilai keagamaan melalui kebiasaan sembahyang bersama, menghaturkan *banten*, menghormati orang tua dan leluhur, serta melibatkan anak-anak dalam berbagai kegiatan adat dan keagamaan. Proses tersebut kemudian diperkuat melalui partisipasi dalam organisasi adat, kegiatan *ngayah*, dan pelaksanaan upacara keagamaan di pura. Dengan demikian, religiusitas berkembang sebagai pengalaman hidup yang diwariskan secara turun-temurun melalui praktik sosial, bukan semata-mata melalui pendidikan formal. McGuire (2008) menyebut fenomena

tersebut sebagai *lived religion*, yaitu agama yang hadir dalam pengalaman nyata masyarakat melalui kebiasaan, tindakan, dan relasi sosial sehari-hari.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masyarakat adat memaknai religiusitas sebagai bentuk pengabdian (*bhakti*) kepada Tuhan yang diwujudkan melalui pengamalan nilai-nilai *dharma*. Bagi informan, seseorang tidak cukup disebut religius hanya karena rajin mengikuti upacara keagamaan, tetapi harus tercermin dalam perilaku yang jujur, bertanggung jawab, saling menghormati, serta memiliki kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. Oleh karena itu, religiusitas dipahami sebagai kesatuan antara dimensi spiritual, moral, dan sosial. Pandangan ini sejalan dengan ajaran Hindu yang menempatkan *Tri Kaya Parisudha*—berpikir (*manacika*), berkata (*wacika*), dan berbuat (*kayika*) yang baik dan benar—sebagai dasar perilaku manusia dalam mencapai kehidupan yang harmonis. Dengan demikian, kualitas religiusitas masyarakat tidak hanya diukur melalui intensitas ritual, tetapi juga melalui implementasi nilai-nilai etis dalam kehidupan sehari-hari.

Religiusitas masyarakat adat Hindu di Kabupaten Buleleng juga sangat dipengaruhi oleh filosofi *Tri Hita Karana*, yang menekankan terciptanya keharmonisan antara manusia dengan Tuhan (*parhyangan*), manusia dengan sesama (*pawongan*), dan manusia dengan alam (*palemahan*). Berdasarkan temuan lapangan, ketiga dimensi tersebut tidak dipahami sebagai konsep yang bersifat abstrak, tetapi diwujudkan dalam berbagai aktivitas sosial-keagamaan. Hubungan dengan Tuhan direalisasikan melalui persembahyangan rutin,

pelaksanaan *Pañca Yajña*, dan pemeliharaan kesucian pura. Hubungan antarmanusia diwujudkan melalui tradisi gotong royong (*ngayah*), musyawarah adat (*paruman*), saling membantu ketika ada upacara adat maupun kedukaan, serta penghormatan kepada orang yang lebih tua. Sementara itu, hubungan dengan alam tercermin dalam kebiasaan menjaga kawasan suci, melestarikan sumber mata air, memelihara hutan adat, dan melaksanakan ritual yang berkaitan dengan keseimbangan alam. Temuan ini menguatkan pandangan bahwa religiusitas masyarakat Hindu Bali memiliki dimensi ekologis yang kuat dan menjadi bagian dari sistem budaya yang menjaga keberlanjutan kehidupan (Pitana, 1994).

Selain *Tri Hita Karana*, masyarakat juga memaknai religiusitas melalui nilai *Tat Twam Asi*, yaitu ajaran yang mengajarkan bahwa setiap makhluk memiliki hakikat yang sama sebagai ciptaan Tuhan. Nilai tersebut menjadi dasar dalam membangun solidaritas sosial, toleransi, dan kepedulian terhadap sesama anggota masyarakat. Dalam berbagai kegiatan adat, tidak ditemukan perbedaan perlakuan berdasarkan status ekonomi maupun latar belakang sosial karena seluruh warga memiliki kewajiban yang sama dalam menjalankan *ayahan desa*. Kesadaran kolektif ini memperlihatkan bahwa religiusitas berfungsi sebagai modal sosial yang memperkuat kohesi masyarakat. Temuan tersebut sejalan dengan teori Durkheim (1995) yang menyatakan bahwa agama memiliki fungsi menciptakan solidaritas sosial melalui terbentuknya kesadaran kolektif (*collective conscience*) yang mengikat

seluruh anggota masyarakat dalam sistem nilai yang sama.

Perspektif etnografi juga menunjukkan bahwa simbol-simbol keagamaan memiliki makna yang sangat penting dalam membangun religiusitas masyarakat adat. Pura tidak hanya dipandang sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat identitas komunal dan ruang pembentukan solidaritas sosial. Demikian pula berbagai sarana upacara seperti *canang sari*, *banten*, *penjor*, dan busana adat dipahami bukan sekadar perlengkapan ritual, melainkan simbol penghormatan kepada Tuhan sekaligus representasi nilai-nilai spiritual yang diwariskan oleh leluhur. Melalui simbol-simbol tersebut, masyarakat terus mereproduksi nilai-nilai religius dalam kehidupan sehari-hari sehingga agama hadir sebagai realitas yang hidup di tengah masyarakat. Hal ini memperkuat pemikiran Geertz (1973) bahwa simbol-simbol agama berfungsi membangun makna kolektif yang mengarahkan tindakan sosial masyarakat.

Temuan penelitian juga mengindikasikan bahwa religiusitas masyarakat adat Hindu di Kabupaten Buleleng bersifat dinamis. Modernisasi, perkembangan teknologi informasi, serta meningkatnya mobilitas masyarakat memang membawa perubahan terhadap pola kehidupan sosial, terutama pada generasi muda. Namun, perubahan tersebut tidak serta-merta mengurangi tingkat religiusitas masyarakat. Sebaliknya, masyarakat menunjukkan kemampuan beradaptasi dengan memanfaatkan media digital sebagai sarana penyebaran informasi keagamaan, koordinasi kegiatan adat, hingga pendidikan agama bagi generasi

muda. Upaya tersebut menunjukkan bahwa religiusitas tidak bersifat statis, melainkan terus mengalami rekonstruksi sesuai dengan konteks sosial yang berkembang. Berger (1967) menjelaskan bahwa agama selalu mengalami proses dialektika dengan realitas sosial sehingga mampu mempertahankan relevansinya dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa konstruksi religiusitas masyarakat adat Hindu di Kabupaten Buleleng merupakan hasil integrasi antara ajaran agama Hindu, sistem adat, nilai budaya lokal, serta pengalaman historis masyarakat. Religiusitas tidak berhenti pada dimensi keyakinan atau ritual semata, tetapi menjadi fondasi dalam membangun identitas budaya, solidaritas sosial, serta keberlanjutan kehidupan masyarakat adat. Dengan demikian, religiusitas berfungsi sebagai kekuatan moral yang menjaga keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam semesta. Temuan ini memperluas kajian tentang *lived religion* dengan menunjukkan bahwa dalam masyarakat adat Hindu Bali, religiusitas merupakan sistem nilai yang hidup, diwariskan, dan terus direproduksi melalui praktik sosial-keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Temuan ini sekaligus menegaskan bahwa keberlangsungan masyarakat adat tidak hanya ditopang oleh struktur kelembagaan adat, tetapi juga oleh kekuatan religiusitas yang tertanam kuat dalam kesadaran kolektif masyarakat.

3.2 Manifestasi Religiusitas dalam Kehidupan Sosial-Keagamaan Masyarakat Adat Hindu di Kabupaten Buleleng

Religiusitas masyarakat adat Hindu di Kabupaten Buleleng tidak hanya tercermin dalam keyakinan terhadap ajaran Hindu, tetapi juga termanifestasi secara nyata dalam berbagai praktik sosial-keagamaan yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, hampir seluruh aktivitas sosial masyarakat memiliki dimensi religius yang kuat. Kehidupan masyarakat tidak mengenal dikotomi antara urusan keagamaan dan urusan sosial, karena keduanya dipandang sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi. Setiap kegiatan adat, mulai dari rapat desa (*paruman*), gotong royong, pembangunan fasilitas umum, hingga penyelesaian konflik sosial, selalu diawali dengan doa atau persembahan sebagai bentuk permohonan restu kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Hal ini menunjukkan bahwa religiusitas menjadi landasan moral sekaligus spiritual dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat. Temuan tersebut sejalan dengan pandangan Berger (1967) yang menyatakan bahwa agama berfungsi sebagai *sacred canopy*, yaitu sistem makna yang memberikan legitimasi terhadap tatanan sosial masyarakat.

Salah satu manifestasi religiusitas yang paling menonjol adalah pelaksanaan *Pañca Yajña*, yang menjadi pusat kehidupan spiritual masyarakat adat. Berdasarkan temuan penelitian, kelima bentuk yadnya—*Dewa Yajña*, *Pitra Yajña*, *Manusa*

Yajña, *Rsi Yajña*, dan *Bhuta Yajña*—tidak dipahami hanya sebagai kewajiban ritual, tetapi sebagai media membangun keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan, leluhur, sesama manusia, para guru suci, serta alam semesta. Pelaksanaan yadnya melibatkan hampir seluruh unsur masyarakat melalui pembagian tugas, penyediaan sarana upacara, hingga pelaksanaan persembahyangan bersama. Keterlibatan kolektif tersebut memperlihatkan bahwa yadnya memiliki fungsi sosial yang sangat kuat karena mampu mempererat hubungan antarwarga sekaligus memperkuat identitas komunal masyarakat adat. Dalam perspektif Durkheim (1995), ritual keagamaan seperti ini berfungsi membangun *collective effervescence*, yaitu pengalaman emosional bersama yang memperkuat solidaritas sosial dan kesadaran kolektif masyarakat.

Manifestasi religiusitas juga tampak melalui tradisi *ngayah*, yang masih dipertahankan secara konsisten oleh masyarakat adat Hindu di Kabupaten Buleleng. *Ngayah* dipahami sebagai bentuk pelayanan tulus (*sewa*) yang dilakukan tanpa mengharapkan imbalan material. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat memandang *ngayah* sebagai implementasi ajaran *karma yoga*, yaitu bekerja sebagai bentuk persembahan kepada Tuhan. Aktivitas *ngayah* dilakukan dalam berbagai kegiatan, seperti persiapan upacara keagamaan, pembangunan dan pemeliharaan pura, kebersihan lingkungan desa, hingga membantu warga yang sedang melaksanakan upacara adat. Menariknya, keterlibatan masyarakat dalam *ngayah* tidak dipengaruhi oleh status sosial maupun kondisi ekonomi, tetapi didasarkan pada kesadaran moral sebagai bagian

dari kewajiban bersama (*swadharma*). Kondisi ini menunjukkan bahwa religiusitas berperan sebagai modal sosial (*social capital*) yang memperkuat rasa memiliki, solidaritas, dan tanggung jawab kolektif terhadap komunitas (Putnam, 2000).

Selain *ngayah*, religiusitas masyarakat juga diwujudkan melalui pelaksanaan *paruman adat*, yaitu forum musyawarah yang menjadi mekanisme pengambilan keputusan dalam kehidupan masyarakat adat. Berdasarkan temuan penelitian, setiap keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan upacara, pengelolaan pura, penyelesaian sengketa, maupun kegiatan sosial selalu dibahas melalui musyawarah yang dilandasi oleh nilai-nilai *dharma*. Keputusan yang dihasilkan tidak hanya mempertimbangkan aspek administratif, tetapi juga memperhatikan nilai kesucian, keseimbangan, dan keharmonisan sebagaimana diajarkan dalam agama Hindu. Dengan demikian, *paruman adat* bukan sekadar lembaga sosial, melainkan juga menjadi ruang aktualisasi religiusitas dalam praktik kehidupan bermasyarakat. Hal ini memperlihatkan bahwa agama berfungsi sebagai sumber etika publik yang mengarahkan proses pengambilan keputusan dalam masyarakat adat.

Temuan penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa **pura** memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai pusat kehidupan religius sekaligus pusat interaksi sosial masyarakat. Bagi masyarakat adat Hindu di Kabupaten Buleleng, pura bukan hanya tempat melaksanakan persembahyangan, tetapi juga ruang pendidikan budaya, pewarisan nilai, dan pembentukan identitas komunal. Pada saat

berlangsungnya piodalan atau upacara besar, seluruh lapisan masyarakat berkumpul, bekerja sama, dan berpartisipasi sesuai dengan peran masing-masing. Interaksi tersebut memperkuat hubungan sosial antarkeluarga, antargenerasi, serta antarbanjar. Dalam perspektif antropologi simbolik, pura merupakan simbol kolektif yang menghubungkan dimensi sakral dengan kehidupan sosial masyarakat (Geertz, 1973). Oleh karena itu, keberadaan pura memiliki fungsi multidimensional, yaitu sebagai pusat spiritual, pusat budaya, dan pusat kohesi sosial masyarakat adat.

Manifestasi religiusitas juga tercermin dalam penghormatan masyarakat terhadap leluhur sebagai bagian dari sistem kepercayaan Hindu Bali. Berdasarkan hasil wawancara, penghormatan kepada leluhur dipahami sebagai bentuk rasa terima kasih atas jasa para pendahulu sekaligus sebagai upaya menjaga kesinambungan hubungan spiritual antargenerasi. Nilai tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan *Pitra Yajña*, pemeliharaan tempat suci keluarga (*sanggah* atau *merajan*), serta berbagai ritual yang berkaitan dengan penghormatan terhadap roh leluhur. Praktik ini menunjukkan bahwa religiusitas masyarakat tidak hanya berorientasi pada hubungan vertikal dengan Tuhan, tetapi juga mencakup hubungan historis dan genealogis yang menjadi dasar identitas keluarga dan komunitas adat. Perspektif ini memperlihatkan bahwa agama menjadi media yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan masyarakat melalui kesinambungan tradisi.

Aspek lain yang menunjukkan kuatnya manifestasi religiusitas adalah kepedulian masyarakat terhadap

pelestarian alam. Berdasarkan observasi lapangan, masyarakat adat masih mempertahankan berbagai aturan adat yang berkaitan dengan perlindungan kawasan suci, mata air, hutan, dan lahan pertanian. Beberapa ritual seperti *Tumpek Wariga*, *Tumpek Uye*, serta pelaksanaan *Bhuta Yajña* dipahami sebagai bentuk penghormatan terhadap alam sebagai ciptaan Tuhan yang harus dijaga keseimbangannya. Masyarakat meyakini bahwa kerusakan alam akan berdampak pada terganggunya keseimbangan kehidupan manusia. Temuan ini menunjukkan bahwa religiusitas masyarakat adat memiliki dimensi ekologis yang kuat dan sejalan dengan filosofi *Tri Hita Karana*, khususnya pada aspek *palemahan*. Dengan demikian, praktik keagamaan tidak hanya memiliki makna spiritual, tetapi juga berkontribusi terhadap konservasi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan (Pitana, 1994).

Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan sosial, bentuk-bentuk manifestasi religiusitas masyarakat juga mengalami transformasi. Penelitian menemukan bahwa media digital mulai dimanfaatkan untuk menyebarluaskan informasi kegiatan adat, mengoordinasikan pelaksanaan upacara, serta memberikan edukasi keagamaan kepada generasi muda. Beberapa desa adat telah menggunakan media sosial dan aplikasi komunikasi sebagai sarana memperkuat koordinasi antarwarga tanpa mengurangi nilai-nilai tradisional yang dijunjung tinggi. Fenomena ini menunjukkan bahwa religiusitas masyarakat adat Hindu di Kabupaten Buleleng bersifat adaptif terhadap perkembangan zaman. Transformasi tersebut bukan

merupakan bentuk pelemahan agama, melainkan strategi untuk mempertahankan keberlangsungan nilai-nilai religius dalam konteks masyarakat modern. Casanova (1994) menyatakan bahwa modernisasi tidak selalu menyebabkan sekularisasi, tetapi justru dapat melahirkan bentuk-bentuk baru ekspresi religius yang sesuai dengan perubahan sosial.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa manifestasi religiusitas masyarakat adat Hindu di Kabupaten Buleleng hadir dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari ritual keagamaan, tradisi *ngayah*, musyawarah adat, penghormatan terhadap leluhur, pelestarian lingkungan, hingga adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Seluruh praktik tersebut memperlihatkan bahwa religiusitas bukan hanya urusan spiritual individual, melainkan menjadi kekuatan sosial yang membangun solidaritas, memperkuat identitas budaya, dan menjaga keberlanjutan masyarakat adat. Temuan ini menegaskan bahwa kehidupan sosial-keagamaan masyarakat adat Hindu di Kabupaten Buleleng merupakan representasi nyata dari konsep *agama yang hidup (lived religion)*, di mana nilai-nilai agama terus diproduksi, diinternalisasi, dan diwujudkan dalam praktik kehidupan sehari-hari melalui interaksi sosial dan budaya. Dengan demikian, religiusitas menjadi fondasi utama yang menopang keberlangsungan masyarakat adat Hindu di tengah dinamika perubahan sosial kontemporer.

3.3 Peran Lembaga Adat dalam Memelihara Religiusitas Masyarakat Adat Hindu di Kabupaten Buleleng

Keberlangsungan religiusitas masyarakat adat Hindu di Kabupaten Buleleng tidak terlepas dari peran lembaga adat sebagai institusi sosial yang mengintegrasikan nilai-nilai agama, budaya, dan kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, lembaga adat tidak hanya berfungsi sebagai pengelola kehidupan sosial masyarakat, tetapi juga sebagai penjaga keberlanjutan ajaran Hindu dalam praktik kehidupan sehari-hari. Melalui berbagai aturan adat, mekanisme organisasi, serta kepemimpinan tradisional, lembaga adat mampu mempertahankan sistem nilai religius yang diwariskan secara turun-temurun. Dengan demikian, religiusitas masyarakat tidak hanya tumbuh dari kesadaran individu, tetapi juga dibentuk dan dipelihara melalui struktur sosial yang hidup dalam komunitas adat. Temuan ini menguatkan pandangan Berger (1967) bahwa agama memperoleh legitimasi sosial melalui proses institusionalisasi yang menjadikannya bagian dari realitas objektif masyarakat.

Salah satu lembaga yang memiliki peran sentral adalah *desa adat*. Dalam kehidupan masyarakat Hindu Bali, *desa adat* merupakan institusi yang mengatur hubungan antara aspek keagamaan, sosial, budaya, dan lingkungan secara terpadu. Berdasarkan temuan penelitian, seluruh kegiatan keagamaan, mulai dari penyusunan kalender upacara, pengelolaan pura, pelaksanaan

piodalan, hingga kegiatan sosial masyarakat dilaksanakan melalui koordinasi *desa adat*. Keberadaan *desa adat* memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan religius sekaligus memperkuat rasa memiliki terhadap komunitasnya. Selain itu, *desa adat* menjadi media utama dalam mentransmisikan nilai-nilai Hindu kepada generasi muda melalui keterlibatan langsung dalam berbagai aktivitas adat. Kondisi ini menunjukkan bahwa *desa adat* berfungsi sebagai wahana pendidikan sosial-keagamaan yang berlangsung secara informal namun berkesinambungan.

Peran tersebut semakin diperkuat melalui keberadaan ***awig-awig*** sebagai aturan adat yang mengatur kehidupan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ***awig-awig*** tidak hanya mengatur hubungan sosial antarmasyarakat, tetapi juga memuat berbagai ketentuan mengenai kewajiban keagamaan, tata cara pelaksanaan upacara, pemeliharaan tempat suci, hingga kewajiban warga dalam kegiatan *ngayah*. Bagi masyarakat adat, kepatuhan terhadap ***awig-awig*** dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan *dharma*, sehingga pelanggaran terhadap aturan adat tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran sosial, tetapi juga memiliki konsekuensi moral dan spiritual. Dengan demikian, ***awig-awig*** berfungsi sebagai instrumen yang mengintegrasikan norma agama dengan norma sosial dalam kehidupan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan pandangan Koentjaraningrat (2009) yang menyatakan bahwa sistem norma budaya merupakan mekanisme utama

dalam menjaga keteraturan sosial dan keberlanjutan kebudayaan.

Selain desa adat, *banjar adat* memiliki fungsi strategis dalam membangun kehidupan religius masyarakat pada tingkat komunitas. Berdasarkan hasil observasi, banjar menjadi ruang interaksi sosial yang paling intensif karena hampir seluruh aktivitas masyarakat dilaksanakan melalui organisasi ini. Pelaksanaan gotong royong, persiapan upacara keagamaan, musyawarah, hingga kegiatan sosial kemasyarakatan dikoordinasikan oleh pengurus banjar bersama seluruh anggota masyarakat. Melalui aktivitas tersebut, nilai-nilai religius tidak diajarkan secara teoritis, tetapi dipraktikkan secara langsung melalui kerja sama, saling membantu, dan tanggung jawab bersama. Proses ini menciptakan pengalaman kolektif yang memperkuat solidaritas sosial sekaligus memperkuat identitas masyarakat adat sebagai komunitas religius. Dalam perspektif Durkheim (1995), pengalaman kolektif seperti ini menjadi dasar terbentuknya kesadaran bersama (*collective conscience*) yang menjaga integrasi sosial masyarakat.

Keberhasilan lembaga adat dalam memelihara religiusitas juga tidak terlepas dari peran *bendesa adat*, *pemangku*, dan *sulinggih* sebagai pemimpin spiritual sekaligus pemimpin sosial masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, bendesa adat bertanggung jawab mengoordinasikan seluruh aktivitas adat dan memastikan bahwa pelaksanaannya tetap selaras dengan nilai-nilai agama Hindu. Sementara itu, pemangku berperan memimpin pelaksanaan ritual keagamaan, memberikan bimbingan spiritual, serta menjaga kesucian pura. Adapun sulinggih memiliki otoritas keagamaan

dalam memberikan dharma wacana, pembinaan umat, serta menjadi rujukan dalam berbagai persoalan keagamaan. Sinergi ketiga unsur tersebut menciptakan sistem kepemimpinan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga spiritual dan moral. Kepemimpinan yang demikian memperkuat internalisasi nilai religius dalam kehidupan masyarakat karena para pemimpin adat tidak hanya mengatur, tetapi juga menjadi teladan dalam menjalankan ajaran agama.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa lembaga adat berperan penting dalam proses pewarisan religiusitas antargenerasi. Keterlibatan anak-anak dan remaja dalam kegiatan adat sejak usia dini merupakan strategi utama yang dilakukan masyarakat untuk menjaga keberlanjutan nilai-nilai keagamaan. Mereka dilibatkan dalam pembuatan sarana upacara, kegiatan *ngayah*, latihan kesenian sakral, hingga pelaksanaan berbagai ritual di pura. Melalui proses tersebut, generasi muda tidak hanya memperoleh pengetahuan mengenai tata cara pelaksanaan upacara, tetapi juga memahami nilai filosofis yang melandasi setiap aktivitas keagamaan. Menurut Lave dan Wenger (1991), proses pembelajaran yang berlangsung melalui partisipasi langsung dalam komunitas praktik (*community of practice*) merupakan bentuk pendidikan yang efektif dalam mentransmisikan pengetahuan dan nilai budaya antargenerasi. Temuan ini menunjukkan bahwa keberlangsungan religiusitas masyarakat adat lebih banyak dibangun melalui pengalaman langsung daripada pembelajaran formal.

Di tengah arus globalisasi, lembaga adat juga menunjukkan kemampuan beradaptasi tanpa meninggalkan nilai-nilai tradisional. Berdasarkan temuan penelitian, beberapa desa adat mulai memanfaatkan teknologi digital untuk mengelola administrasi adat, menyampaikan informasi kegiatan keagamaan, mendokumentasikan tradisi, serta memperkuat komunikasi antarwarga. Meskipun demikian, penggunaan teknologi tersebut tidak menggantikan mekanisme adat yang telah ada, melainkan berfungsi sebagai sarana pendukung untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan sosial-keagamaan. Fenomena ini menunjukkan bahwa lembaga adat memiliki kapasitas adaptif dalam menghadapi perubahan sosial sehingga tetap relevan di tengah perkembangan masyarakat modern. Ahimsa-Putra (2023) menyatakan bahwa kebudayaan yang mampu bertahan bukanlah kebudayaan yang menolak perubahan, melainkan yang mampu melakukan transformasi tanpa kehilangan struktur nilai dasarnya.

Meskipun memiliki peran yang sangat penting, penelitian ini juga menemukan sejumlah tantangan yang dihadapi lembaga adat dalam memelihara religiusitas masyarakat. Perubahan orientasi generasi muda, meningkatnya mobilitas penduduk, tuntutan ekonomi, serta berkurangnya waktu masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan adat menjadi tantangan yang semakin nyata. Selain itu, masuknya budaya global melalui media digital berpotensi memengaruhi cara pandang generasi muda terhadap tradisi dan kehidupan religius. Namun demikian, masyarakat adat di Kabupaten Buleleng menunjukkan

komitmen yang kuat untuk mempertahankan keberlanjutan nilai-nilai religius melalui penguatan pendidikan adat, peningkatan pembinaan keagamaan, serta revitalisasi berbagai tradisi lokal yang melibatkan generasi muda secara aktif.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa lembaga adat merupakan pilar utama dalam memelihara religiusitas masyarakat adat Hindu di Kabupaten Buleleng. Desa adat, banjar adat, *awig-awig*, bendesa adat, pemangku, dan sulinggih membentuk suatu sistem kelembagaan yang saling melengkapi dalam menjaga keberlangsungan nilai-nilai agama Hindu di tengah kehidupan masyarakat. Keberadaan lembaga adat tidak hanya menjamin terselenggaranya berbagai aktivitas keagamaan, tetapi juga menjadi media pendidikan budaya, pembentukan karakter, penguatan solidaritas sosial, dan pelestarian identitas masyarakat adat. Dengan demikian, religiusitas masyarakat adat Hindu di Kabupaten Buleleng tidak dapat dipahami hanya sebagai praktik spiritual individual, tetapi merupakan hasil dari proses kelembagaan yang terus mereproduksi nilai-nilai agama melalui interaksi sosial, kepemimpinan adat, dan pewarisan budaya antargenerasi. Temuan ini mempertegas bahwa keberlanjutan masyarakat adat Hindu sangat bergantung pada kemampuan lembaga adat dalam menjaga keseimbangan antara pelestarian tradisi dan adaptasi terhadap perubahan sosial yang terus berkembang.

3.4 Dinamika Religiusitas Masyarakat Adat Hindu di Kabupaten Buleleng dalam Menghadapi Perubahan Sosial

Religiusitas masyarakat adat Hindu di Kabupaten Buleleng merupakan fenomena yang dinamis dan terus mengalami transformasi seiring dengan perkembangan sosial, ekonomi, budaya, dan teknologi. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, masyarakat menyadari bahwa perubahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan, namun perubahan tersebut tidak dipandang sebagai ancaman terhadap agama, melainkan sebagai tantangan untuk mempertahankan nilai-nilai religius dalam konteks yang terus berkembang. Kehidupan masyarakat adat memperlihatkan adanya proses negosiasi antara tradisi dengan modernitas, di mana nilai-nilai Hindu tetap dijadikan sebagai landasan utama dalam menyikapi berbagai perubahan sosial. Temuan ini menunjukkan bahwa religiusitas masyarakat adat tidak bersifat statis, tetapi memiliki kemampuan adaptif yang memungkinkan tradisi tetap lestari tanpa kehilangan substansi ajaran agama. Berger (1967) menyatakan bahwa agama selalu mengalami proses dialektika dengan masyarakat sehingga mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan sosial tanpa kehilangan fungsi dasarnya sebagai sistem makna.

Salah satu perubahan yang paling dirasakan masyarakat adalah pengaruh globalisasi terhadap pola pikir dan gaya hidup, terutama pada generasi muda. Berdasarkan hasil wawancara, kemudahan akses terhadap informasi, budaya populer, serta

meningkatnya mobilitas pendidikan dan pekerjaan telah mengubah orientasi sebagian masyarakat dalam memandang kehidupan. Generasi muda memiliki peluang yang lebih besar untuk berinteraksi dengan budaya di luar komunitas adat, sehingga muncul kecenderungan perubahan pola partisipasi dalam kegiatan keagamaan. Beberapa informan mengungkapkan bahwa keterlibatan generasi muda dalam kegiatan adat tidak lagi seintensif generasi sebelumnya karena adanya tuntutan pendidikan, pekerjaan, maupun aktivitas ekonomi lainnya. Meskipun demikian, perubahan tersebut tidak selalu bermakna menurunnya religiusitas, melainkan lebih menunjukkan perubahan dalam cara masyarakat mengekspresikan keberagamaannya. Casanova (1994) menjelaskan bahwa modernisasi tidak selalu menghasilkan sekularisasi, tetapi dapat melahirkan bentuk-bentuk baru religiusitas yang lebih sesuai dengan konteks masyarakat modern.

Perubahan juga terlihat pada pemanfaatan teknologi digital dalam kehidupan sosial-keagamaan masyarakat adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai desa adat di Kabupaten Buleleng mulai memanfaatkan media sosial, aplikasi pesan instan, dan platform digital sebagai sarana penyampaian informasi mengenai jadwal upacara, rapat adat, kegiatan *ngayah*, hingga penyebaran materi keagamaan. Teknologi digital juga digunakan untuk mendokumentasikan berbagai tradisi lokal sebagai upaya pelestarian budaya. Kehadiran teknologi tersebut mempercepat komunikasi antarmasyarakat sekaligus meningkatkan partisipasi warga yang berada di luar daerah. Dengan

demikian, digitalisasi tidak menggantikan praktik religius yang telah ada, tetapi menjadi media pendukung yang memperkuat efektivitas komunikasi dalam komunitas adat. Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat adat mampu melakukan inovasi tanpa menghilangkan nilai-nilai sakral yang menjadi dasar kehidupan religius mereka.

Di sisi lain, perkembangan sektor pariwisata dan ekonomi juga memberikan pengaruh terhadap kehidupan religius masyarakat adat. Kabupaten Buleleng sebagai salah satu destinasi wisata di Bali mengalami peningkatan aktivitas ekonomi yang membuka peluang kerja dan usaha bagi masyarakat. Berdasarkan temuan penelitian, peningkatan aktivitas ekonomi berdampak pada perubahan alokasi waktu masyarakat sehingga pelaksanaan kegiatan adat harus menyesuaikan dengan jadwal pekerjaan warga. Namun demikian, masyarakat tetap berupaya mempertahankan kewajiban adat melalui sistem pembagian tugas dan penjadwalan yang lebih fleksibel. Hal ini menunjukkan adanya kemampuan masyarakat dalam menyeimbangkan antara tuntutan ekonomi dengan kewajiban religius. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa aktivitas ekonomi tidak selalu mengurangi kualitas religiusitas, tetapi justru mendorong masyarakat untuk menemukan bentuk-bentuk baru dalam mempertahankan komitmen terhadap adat dan agama.

Dinamika religiusitas juga tampak pada perubahan pola pendidikan keagamaan. Berdasarkan hasil penelitian, proses pewarisan nilai-nilai Hindu tidak lagi hanya berlangsung melalui keluarga dan

kegiatan adat, tetapi juga didukung oleh pendidikan formal, pasraman, organisasi kepemudaan, serta media digital. Beberapa desa adat secara aktif menyelenggarakan pelatihan pembuatan *banten*, pembelajaran aksara Bali, pembinaan dharma gita, dan kegiatan diskusi keagamaan yang melibatkan generasi muda. Langkah tersebut dilakukan sebagai strategi untuk memperkuat pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai agama Hindu sekaligus membangun kebanggaan terhadap identitas budaya lokal. Dalam perspektif teori pembelajaran sosial, proses pewarisan budaya yang melibatkan partisipasi aktif komunitas akan memperkuat internalisasi nilai-nilai yang menjadi dasar kehidupan masyarakat (Lave & Wenger, 1991). Oleh karena itu, pendidikan keagamaan berbasis komunitas menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlanjutan religiusitas masyarakat adat.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa desa adat memiliki peran yang sangat strategis dalam mengelola perubahan sosial. Berbagai inovasi dilakukan tanpa menghilangkan prinsip-prinsip dasar adat dan agama. Misalnya, pemanfaatan sistem administrasi digital, penyusunan kalender kegiatan berbasis teknologi informasi, hingga dokumentasi digital terhadap naskah dan tradisi lokal. Meskipun demikian, pelaksanaan ritual keagamaan tetap dilakukan sesuai ketentuan adat dan sastra agama yang berlaku. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat adat menerapkan prinsip adaptasi selektif, yaitu menerima unsur-unsur baru yang memberikan manfaat praktis tanpa mengubah nilai-nilai fundamental yang menjadi identitas budaya. Ahimsa-

Putra (2023) menyatakan bahwa kemampuan budaya untuk bertahan sangat ditentukan oleh kemampuannya melakukan transformasi secara kreatif tanpa kehilangan struktur nilai yang menjadi fondasinya.

Meskipun masyarakat menunjukkan kemampuan adaptasi yang baik, penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan yang perlu mendapat perhatian. Menurunnya minat sebagian generasi muda terhadap aktivitas adat, berkurangnya jumlah tenaga sukarela dalam kegiatan *ngayah*, meningkatnya individualisme akibat perkembangan teknologi, serta tekanan ekonomi merupakan persoalan yang mulai dirasakan oleh masyarakat adat. Selain itu, arus informasi yang sangat cepat melalui media digital membawa berbagai nilai baru yang tidak selalu sejalan dengan budaya lokal. Oleh karena itu, penguatan pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Hindu, revitalisasi tradisi lokal, serta peningkatan peran keluarga dan lembaga adat menjadi strategi yang dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan religiusitas masyarakat. Temuan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan masyarakat adat dalam menghadapi perubahan sosial sangat bergantung pada sinergi antara keluarga, desa adat, lembaga keagamaan, dan institusi pendidikan.

Secara keseluruhan, dinamika religiusitas masyarakat adat Hindu di Kabupaten Buleleng menunjukkan bahwa agama tidak mengalami kemunduran di tengah perubahan sosial, tetapi justru mengalami proses transformasi yang memperkuat relevansinya dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai dasar seperti dharma, bhakti, *ngayah*, Tri Hita Karana, dan Tat Twam Asi tetap

menjadi fondasi utama dalam membangun hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam, meskipun bentuk implementasinya mengalami penyesuaian terhadap perkembangan zaman. Temuan ini memperkuat konsep *lived religion* yang memandang religiusitas sebagai praktik sosial yang terus dikonstruksi melalui pengalaman hidup masyarakat (McGuire, 2008). Dengan demikian, masyarakat adat Hindu di Kabupaten Buleleng tidak hanya mempertahankan tradisi sebagai warisan budaya, tetapi juga mampu mentransformasikannya menjadi sumber kekuatan sosial dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan modern. Kemampuan adaptif tersebut menjadi indikator bahwa religiusitas masyarakat adat bukan sekadar peninggalan masa lalu, melainkan modal budaya dan spiritual yang tetap relevan dalam menopang keberlanjutan masyarakat Hindu Bali di era kontemporer.

IV. PENUTUP

4.1 SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa religiusitas masyarakat adat Hindu di Kabupaten Buleleng merupakan konstruksi sosial-keagamaan yang terbentuk melalui integrasi antara ajaran Hindu, sistem adat, dan budaya lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Religiusitas tidak hanya dimaknai sebagai pelaksanaan ritual keagamaan, tetapi sebagai cara hidup yang mengarahkan pola pikir, sikap, dan perilaku masyarakat dalam membangun hubungan yang harmonis dengan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, sesama manusia, leluhur, dan alam semesta.

Nilai-nilai Hindu seperti Dharma, Tri Hita Karana, Tat Twam Asi, Tri Kaya Parisudha, dan Pañca Yajña diinternalisasikan melalui keluarga, desa adat, banjar adat, serta berbagai praktik sosial-keagamaan seperti *ngayah*, *paruman adat*, pelaksanaan upacara keagamaan, dan pelestarian lingkungan. Lembaga adat berperan sebagai institusi utama yang menjaga keberlangsungan religiusitas melalui fungsi edukatif, normatif, dan integratif, sehingga mampu memperkuat solidaritas sosial, membentuk identitas budaya, serta mempertahankan keberlanjutan masyarakat adat Hindu di Kabupaten Buleleng. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa religiusitas masyarakat bersifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan sosial, di mana modernisasi dan perkembangan teknologi dimanfaatkan sebagai sarana untuk memperkuat pelestarian nilai-nilai agama dan budaya tanpa menghilangkan substansi ajaran Hindu.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian antropologi agama dan sosiologi agama melalui penguatan konsep *lived religion* dalam konteks masyarakat adat Hindu di Bali. Penelitian ini menghasilkan model konseptual yang menjelaskan bahwa religiusitas masyarakat adat terbentuk melalui hubungan yang saling menguatkan antara ajaran Hindu, lembaga adat, praktik sosial-keagamaan, dan budaya lokal, yang secara bersama-sama menghasilkan solidaritas sosial, identitas budaya, serta keberlanjutan masyarakat adat. Secara praktis, temuan penelitian dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah, desa adat, Parisada Hindu Dharma Indonesia, dan lembaga

pendidikan dalam merumuskan kebijakan pelestarian budaya, penguatan pendidikan keagamaan, serta pemberdayaan masyarakat adat berbasis nilai-nilai Hindu. Penelitian ini masih terbatas pada masyarakat adat di Kabupaten Buleleng sehingga penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi komparatif pada komunitas masyarakat adat Hindu di wilayah lain di Bali maupun di luar Bali, atau mengembangkan pendekatan interdisipliner untuk mengkaji hubungan religiusitas dengan ketahanan budaya, kepemimpinan adat, dan transformasi sosial pada era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahimsa-Putra, H. S. (2023). *Strukturalisme dalam Kajian Kebudayaan dan Sastra: Pendekatan Analitik Teks Tradisional*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Asad, T. (1993). *Genealogies of Religion: Discipline and Reasons of Power in Christianity and Islam*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Bell, C. (1997). *Ritual: Perspectives and Dimensions*. New York: Oxford University Press.
- Berger, P. L. (1967). *The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion*. New York: Anchor Books.

- Casanova, J. (1994). *Public Religions in the Modern World*. Chicago: University of Chicago Press.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Durkheim, É. (1995). *The Elementary Forms of Religious Life* (K. E. Fields, Trans.). New York: Free Press. (Original work published 1912).
- Geertz, C. (1973). *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books.
- Hammersley, M., & Atkinson, P. (2019). *Ethnography: Principles in Practice* (4th ed.). London: Routledge.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi* (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta.
- Lansing, J. S. (2006). *Perfect Order: Recognizing Complexity in Bali*. Princeton: Princeton University Press.
- Lave, J., & Wenger, E. (1991). *Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills, CA: Sage Publications.
- McGuire, M. B. (2008). *Lived Religion: Faith and Practice in Everyday Life*. New York: Oxford University Press.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Pitana, I G. (1994). *Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Bali*. Denpasar: Bali Post.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon & Schuster.
- Spradley, J. P. (1980). *Participant Observation*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Warren, C. (1993). *Adat and Dinas: Balinese Communities in the Indonesian State*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
-
-